

BAB II: LATAR BELAKANG: KRISIS DIPLOMATIK QATAR DAN KEBIJAKAN BLOKADE ARAB SAUDI TERHADAP QATAR

2.1 Krisis Diplomatik Qatar

Ketegangan politik dalam bentuk krisis diplomatik yang terjadi di Qatar bukanlah suatu hal baru bagi negara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2017 silam, Qatar mengalami krisis diplomatik dimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Isu pemutusan diplomatik, tersebut cukup menggemparkan dunia internasional, namun sebenarnya permasalahan diplomatik yang terjadi di Qatar pada tahun 2017 itu bukanlah suatu hal baru bagi negara tersebut.

Sejarah mencatat bahwa negara Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang paling sering terlibat dalam permasalahan diplomatik. Salah satu permasalahan diplomatik yang pernah terjadi di Qatar adalah sengketa wilayah kedaulatan dengan Bahrain yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu sekitar 65 tahun, tepatnya mulai dari tahun 1936 sampai 2001.

Adapun wilayah yang saat itu menjadi sasaran persengketaan adalah pulau Hawar, wilayah Dibal dan Al-Jaradah dan perairan teritorial Teluk Persia, dan Zubarah, sebuah daerah yang terletak di wilayah semenanjung Qatar. Persengketaan tersebut kemudian diselesaikan melalui jalan damai lewat *International Court Of Justice* (ICJ),

dimana ICJ mengumumkan bahwa penyelesaian kasus sengketa wilayah yang melibatkan kedua negara telah mencapai batas final pada 16 Maret 2001. Menurut ICJ, kasus persengketaan wilayah antara Qatar dan Bahrain ini merupakan kasus persengketaan wilayah dengan durasi waktu terlama, paling berlarut-larut, dan kasus paling kompleks yang pernah diajukan ke pengadilan internasional. Adapun resolusi yang ditetapkan ICJ dalam kasus persengketaan ini adalah dengan memberikan pulau Hawar dan Jaradah kepada Bahrain, dan menghadiahkan wilayah Zubarah, kepulauan Janan dan Al-Dibal (Wiegen, 2012). Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014 tiga negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik duta besar mereka dari Doha, Qatar, keputusan tersebut cukup mengejutkan, karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, Muhammad Zulfikar, seorang dosen Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia berpendapat bahwa tidak ada alasan yang spesifik yang menggambarkan penyebab terjadinya penarikan duta besar oleh ketiga negara tersebut melainkan hanya sebatas untuk melindungi keamanan dan stabilitas negara mereka (Zulfikar, 2014). Sumber lainnya menyebutkan bahwa penyebab dari penarikan duta besar yang dilakukan oleh ketiga negara Teluk tersebut berdasarkan pada anggapan bahwa Qatar telah mengintervensi urusan dalam negeri mereka, lebih tepatnya ketiga negara tersebut menilai bahwa Qatar

telah gagal dalam menerapkan kesepakatan dalam perjanjian terkait keamanan yang telah ditandatangani olehnya pada tahun 2013, dimana isi dari perjanjian tersebut adalah untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota kerjasama Teluk (GCC), serta tidak mendukung media yang bermusuhan. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari tindakan Qatar yang secara terang-terangan mendanai stasiun TV *Al-Jazeera* yang cenderung meliput berita-berita yang berisi tentang kecurigaan terhadap Arab Saudi. Sebaliknya, para pengkritik media *Al-Jazeera* yang terdiri dari negara-negara Teluk yang pro terhadap Arab Saudi justru menuduh bahwa *Al-Jazeera* sangat dekat dengan kelompok *Ikhwanul Muslimin* yang dinilai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai ancaman bagi kawasan. Sebagaimana dilaporkan oleh media kawasan, bahwa keputusan penarikan duta besar tersebut diambil melalui pertemuan para menteri luar negeri dari 6 negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk, GCC yang berlangsung hingga Selasa, 4 Maret 2014 pada malam hari di Riyadh (Gunawan, 2014).

Uraian diatas secara tidak langsung memberikan informasi bahwa krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dan negara-negara Teluk sebenarnya sudah sangat sering terjadi. Kendati begitu, terdapat sedikit perbedaan antara krisis diplomatik Qatar dengan beberapa negara Teluk yang terjadi beberapa tahun yang lalu dengan krisis diplomatik Qatar yang terjadi pada tahun 2017. Perbedaan

tersebut dapat dilihat dari isu yang diangkat dalam krisis diplomatik itu sendiri, dimana krisis diplomatik Qatar dengan beberapa negara Teluk lainnya yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu lebih banyak terpusat pada isu sengketa wilayah semata, sedangkan krisis diplomatik Qatar yang terjadi pada tahun 2017 silam yang hingga saat ini masih terus berlanjut terpusat pada isu kebijakan yang dibuat oleh Qatar itu sendiri. Salah satu kebijakan Qatar yang menjadi pemicu terjadinya krisis diplomatik pada tahun 2017 silam adalah terkait dukungan negara tersebut terhadap Organisasi *Ikhwanul Muslimin*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberpihakan Qatar terhadap organisasi *Ikhwanul Muslimin* dengan cara menampung para tokoh-tokoh ternama dalam kelompok tersebut di negaranya telah mencederai hubungannya dengan Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya. Hal tersebut jelas, karena Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serta beberapa negara Teluk lainnya menganggap bahwa *Ikhwanul Muslimin* merupakan organisasi teroris (AFP, 2017). Salah seorang pejabat Arab Saudi mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh negara-negara Teluk terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi pada 5 Juni 2017 silam tidak lain adalah untuk melindungi keamanan nasionalnya dari bahaya terorisme dan ekstrimisme, alasan serupa juga disampaikan oleh pejabat Uni Emirat Arab yang menuduh Doha sebagai donatur bagi para teroris dan organisasi sektarian (Debora, 2017). Berkat

kekayaan yang dimiliki Qatar, Arab Saudi menuding bahwa negara itu telah menggelontorkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 13,2 triliun rupiah kepada bekas kelompok afiliasi *Al-Qaeda* di Suriah dan aparat keamanan Iran dalam rangka untuk membebaskan 26 anggota Kerajaan Qatar yang dilaporkan diculik oleh kelompok milisi Syiah sokongan Iran, namun Qatar secara tegas membantah tuduhan itu, negara tersebut menambahkan bahwa sejumlah upaya sudah dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi terorisme. Lebih lanjut, negara itu bahkan mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya jauh lebih keras dibandingkan negara-negara Teluk yang menuduh mereka sebagai donatur bagi teroris (Keatinge, 2017).

Hingga saat ini, krisis diplomatik Qatar dengan negara-negara anggota GCC belum menemui titik terang. Sebagai negara yang menjadi korban, Qatar terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negaranya tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Qatar adalah dengan meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan permasalahan krisis diplomatik di negaranya. Merespon hal tersebut, Amerika Serikat kemudian mencari celah penyelesaian sengketa antara Qatar dan Arab Saudi melalui kesepakatan anti-terorisme, kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, dan Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad Bin Abdurrahman Al-Thani, pada 11 Juli 2017. Rex Tillerson menyatakan usai

penandatanganan MoU bahwa “Memorandum yang kami sepakati memaparkan serangkaian langkah yang akan diambil kedua negara dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk mengganggu dan melumpuhkan aliran dana terhadap teroris serta mengintensifkan kegiatan kontra-terorisme secara global”. Meskipun demikian, Arab Saudi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Qatar tersebut tidak begitu berpengaruh untuk mengakhiri krisis diplomatik di Qatar (Kertopati, 2017).

Dibawah ini adalah tabel dinamika perkembangan hubungan diplomatik antara Qatar dan negara-negara Teluk:

Tabel I
Tabel Dinamika Perkembangan Hubungan Diplomatik
Qatar dan Negara-Negara Teluk

No	Tahun	Isu
1.	2008	Qatar dan Arab Saudi mencapai kesepakatan akhir mengenai demarkasi perbatasan setelah bertahun-tahun tegang.
2.	Maret, 2014	Arab Saudi, UEA dan Bahrain menanggukkan hubungan dengan Qatar atas dukungannya terhadap <i>Ikhwanul Muslimin</i> , sebuah organisasi yang diberi label teroris oleh Arab Saudi dan Uni

		Emirat Arab.
3.	November, 2014	Arab Saudi, Uni Emirat Arab sepakat untuk mengembalikan Duta Besar mereka ke Doha, Qatar.
4.	Desember, 2016	Raja Saudi, Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud, tiba di Doha untuk memperkuat hubungan antar kedua negara.
5.	4 Juni 2017	Terkuaknya isi dari email Yousef Al Otaiba, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat yang mengungkap adanya hubungan antara Otaiba dengan sebuah kelompok pemikir pro-Israel di Washington, bersamaan dengan upaya untuk melemahkan citra Qatar.
6.	5 Juni 2017	Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Table I (Debora, 2017).

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki pengaruh paling besar dalam krisis diplomatik yang terjadi di Qatar saat ini, oleh karenanya, penting rasanya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar tersebut. Atas dasar itu, dibawah ini penulis akan memaparkan

terkait gambaran dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut.

2.2 Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar

Krisis diplomatik Qatar 2017 tidak berhenti pada keputusan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar. Lebih dari itu, Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tersebut juga menambahkan penderitaan terhadap Qatar dengan mengeluarkan kebijakan blokade terhadapnya. Kebijakan blokade tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari gejolak perpolitikan yang kerap kali terjadi di Timur Tengah, Abdullah Baabood, seorang guru besar di bidang studi politik Teluk mengatakan, bahwa gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah merupakan ciri khas yang ada pada kawasan tersebut, dengan besarnya gejolak politik yang terjadi, tidak mengherankan jika negara-negara di Timur Tengah termasuk negara-negara Teluk itu sendiri selalu berupaya untuk menguatkan pertahanan mereka dari ancaman-ancaman politik, ekonomi dan sosial yang mungkin akan terus meningkat sewaktu-waktu, tidak terkecuali Qatar, kebijakan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir terhadap dirinya saat ini adalah contoh nyata dari gejolak politik yang menimpa negara tersebut sekaligus ujian bagi Qatar untuk bisa bertahan dalam keadaan yang dihadapinya (Baabood, 2017).

Kebijakan tersebut dikeluarkan tepat setelah mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 silam. Adapun maksud dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tersebut berupa larangan bagi warga Qatar untuk berpergian ke negara mereka. Arab Saudi bersama dengan UEA dan Bahrain memboikot seluruh jalur transportasi yang menghubungkan antara Qatar dan negara-negara Teluk tersebut baik melalui jalur darat, laut, serta udara (Jahsan, 2018). Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya yang melakukan blokade terhadap Qatar menganggap bahwa Qatar merupakan negara semenanjung yang menjadi sponsor bagi kelompok-kelompok teroris, mereka juga menambahkan bahwa Qatar telah melakukan pengkhianatan terhadap negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC), hal tersebut disebabkan oleh kedekatan Qatar dengan Iran yang mereka anggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan negara-negara Teluk (Harb, 2018).

Hingga saat ini, penerapan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap Qatar masih terus berlanjut, hal ini tentunya sangat merugikan Qatar dari berbagai aspek yang diantaranya adalah politik, ekonomi, bidang transportasi dan akomodasi dan kemanusiaan. Situasi yang semakin rumit ini kemudian menuai tanggapan dari berbagai pihak yang ingin turut andil dalam penyelesaian masalah blokade tersebut,

beberapa diantaranya mengecam tindakan dari keempat negara tersebut terhadap Qatar dan menganggap bahwa tindakan blokade tersebut telah melampaui batas bahkan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Anggapan seperti itu salah satunya datang dari salah satu badan PBB, yaitu *Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) yang menuliskan dalam laporan mereka bahwa kebijakan blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan ketiga negara lainnya dapat berpotensi pada pelanggaran HAM bagi warga Qatar. Tidak hanya itu, OHCHR juga menambahkan dalam laporannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan ketiga negara tersebut merupakan hal yang diskriminatif dan tidak memiliki dasar hukum untuk melemahkan perekonomian negara. Laporan PBB juga menilai bahwa blokade yang dilakukan oleh keempat negara tersebut dilakukan secara sepihak, koersif dan sewenang-wenang. Laporan tersebut kemudian menuai kecaman keras dari keempat negara tersebut, mereka menganggap bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh PBB tidaklah benar, tidak akurat serta berdasarkan pada tuduhan yang tidak terbukti. Lebih jauh lagi, keempat negara tersebut mengatakan bahwa OHCHR tidak memahami konteks dan alasan dari krisis diplomatik yang saat ini terjadi, sehingga memancing mereka untuk menjelaskan ulang terkait alasan mereka melakukan blokade terhadap Qatar yang salah satunya adalah berdasarkan pada keberpihakan Qatar terhadap organisasi-organisasi teroris dan

ekstrimis. Selebihnya, keempat negara tersebut juga menambahkan bahwa blokade terhadap Qatar terpaksa ditegakkan oleh mereka berdasarkan pada asas kedaulatan masing-masing negara, hal itu dilakukan demi menjaga keamanan nasional mereka (Adiyudh, 2018). Keempat negara tersebut menilai bahwa laporan yang dibuat oleh OHCHR tersebut mengandung kesalahan metodologis dan prosedural, namun anehnya mereka tidak menyebutkan dimana letak kesalahan metodologis dan proseduralnya tersebut, menurut OHCHR sendiri bahwa laporan yang mereka lakukan sudah sangat jelas dengan mencantumkan dimana lembaga tersebut didirikan serta menjelaskan sifat dari investigasi yang dilakukan (Dugard and Schabas, 2018).

Menanggapi respon-respon yang datang dari berbagai pihak, Arab Saudi bersama ketiga negara lainnya yang terlibat dalam blokade Qatar tersebut mencoba untuk merespon secara baik atas maksud dan tujuan mereka yang intinya adalah untuk mengakhiri krisis diplomatik di Qatar, Arab Saudi dan ketiga negara tersebut sebenarnya sudah mulai membuka diri agar supaya krisis diplomatik di Qatar ini segera diselesaikan dan mereka mengakhiri penerapan kebijakan blokade mereka terhadap Qatar, hanya saja *there is no such free lunch*, ungkapan itulah yang pantas dinisbatkan kepada tindakan Arab Saudi dan ketiga negara tersebut ketika ingin mengakhiri blokade mereka terhadap Qatar, dimana mereka

mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar sebagai syarat untuk mengakhiri blokade tersebut (Saputri, 2017).

Adapun 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir sebagai syarat untuk mengakhiri blokade mereka terhadap Qatar adalah sebagai berikut (Unit, 2017):

1. Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran
2. Mematikan pangkalan militer Turki di Qatar
3. Memutuskan hubungan dengan organisasi teroris serta menghentikan pendanaan terhadap organisasi tersebut baik secara kelompok maupun individu
4. Menyerahkan pembangkang dari negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir yang tinggal di Qatar serta membekukan aset mereka
5. Mengakhiri intervensi terhadap negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir melalui media Qatar
6. Membekukan media *Al-Jazeera* dan outlet media lainnya
7. Menyamakan persepsi kebijakan dengan negara-negara Teluk lainnya dan negara-negara Arab
8. Membayar reparasi dan kompensasi
9. Menyetujui tuntutan dalam waktu 10 hari
10. Adanya pengawasan total dari negara-negara Teluk terhadap Qatar
11. Bersedia membayar audit setiap bulannya selama 10 tahun kepada Arab Saudi ketika tuntutan tersebut diterima

12. Memenuhi semua tuntutan dalam waktu 10 hari, dan apabila tidak terpenuhi maka dianggap gagal dalam menjalankan syarat tersebut

13. Bersedia untuk tidak menjalin hubungan dengan Iran, tuntutan ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. Menutup misi diplomatik Iran di Doha
- b. Mengusir anggota pengawal revolusi Iran serta menghentikan kerja sama militer dengan Taهران
- c. Memastikan bahwa kerja sama perdagangan yang dibangun oleh Qatar dengan Iran mematuhi sanksi-sanksi yang telah dibuat oleh Amerika Serikat dan tidak mengganggu keamanan negara-negara Teluk.

Menanggapi 13 tuntutan tersebut, Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan bahwa 13 ultimatum Arab Saudi kepada negaranya tidak dapat diterima, terlebih lagi terdapat poin yang menyatakan bahwa Qatar harus mengakhiri hubungannya dengan kelompok

teroris, ia menyatakan bahwa permintaan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasarkan pada bukti, dan tidak bisa diterima (Dharma, 2017). Upaya lainnya juga datang dari salah satu negara di Timur Tengah Sendiri, negara itu adalah Kuwait yang mencoba untuk menjadi penengah bagi Arab Saudi dan Qatar, Kuwait bekerja sama dengan negara-negara anggota GCC dalam merumuskan perdamaian antara kedua belah pihak,

namun sayang hal tersebut dinilai telah gagal, karena hingga saat ini belum ada langkah-langkah menuju resolusi signifikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Belum lagi, Amerika Serikat mendorong Kuwait untuk melakukan eskalasi perlawanan terhadap Iran. Hal ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri bagi Kuwait, mengingat sebelumnya, negara itu berupaya untuk netral dari permasalahan yang saat ini terjadi di Timur Tengah (Diwan, 2018). Respon yang sama juga datang dari Oman, dimana negara itu sama sekali tidak ingin terlibat dalam pembelaan terhadap kedua belah pihak. Kenetralan Oman dalam krisis diplomatik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi serta beberapa negara Teluk lainnya bukanlah sebuah niscaya, melainkan sebuah misi untuk menjalankan prinsip kebijakan luar negerinya yang telah tercatat dalam buku kebijakan luar negeri Oman. Kesultanan Oman memang sudah lama menerapkan prinsip kebijakan luar negeri yang independen, serta menjauhi blok-blok politik yang ada di kawasan, hal tersebut dilakukan kesultanan Oman guna menjaga stabilitas hubungan antara Oman dengan negara-negara tetangganya, dan menerapkan prinsip non-intervensi terhadap permasalahan domestik yang ada di negara-negara tetangganya, serta bentuk penghormatan terhadap hukum internasional, konvensi-konvensi, dan aturan-aturan lainnya. Meskipun begitu, Oman tetap menjalin hubungan dengan Qatar dengan baik tanpa terlibat dalam dukungan

terhadap pihak manapun dalam krisis diplomatik yang saat ini terjadi. Doha awalnya memang telah mencari rekan-rekan di Muscat untuk menengahi pertikaian yang saat ini sedang terjadi antara Qatar dan Arab Saudi serta beberapa negara anggota GCC lainnya, saat itu, Oman telah disepakati untuk menjadi negara yang menengahi krisis diplomatik tersebut, namun menimbang banyaknya sensitivitas yang ada dalam permasalahan itu, Oman menolak untuk menjadi mediator bagi krisis diplomatik tersebut. Kendati begitu, Oman tetap mendukung adanya mediasi yang saat ini dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat dalam rangka untuk menyelesaikan krisis diplomatik Qatar tersebut (Babood, 2017). Apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sebenarnya tidak memberikan efek apapun bagi kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar, Belum lagi dengan adanya ungkapan pesimis yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Yousof bin Alawi, yang mengatakan bahwa: *The Standoff pitting Bahrain, Saudi Arabia, The Uni Arab Emirates and Egypt against Qatar is not “eligible for solution”*, ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum terkait kebijakan luar negeri Oman di Muscat (Toumi, 2019).

2.3 Dampak-Dampak Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi negara tersebut, baik dampak tersebut bersifat negatif ataupun positif. Dampak-dampak dari blokade itu terbagi ke dalam beberapa sektor yang antara lain adalah; dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang transportasi dan akomodasi, serta dampak di bidang kemanusiaan.

2.3.1 Dampak Di Bidang Politik

Adapun dampak dari kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar dalam bidang politik dapat dilihat dari beberapa negara lainnya yang sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Qatar secara tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti jejak Arab Saudi dalam pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain dan Mesir (Dennis, 2018). Tidak hanya itu, dua negara Arab lainnya yaitu Yaman dan Libya juga sepakat untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, selain itu terdapat satu negara diluar negara Arab yang juga mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, negara tersebut adalah Maladewa (Wadrianto, 2017). Dampak

politik lainnya yang menimpa Qatar adalah dalam bentuk klaim, dimana negara-negara yang melakukan blokade terhadap Qatar mendasarkan tindakan mereka pada ulah Qatar sendiri yang cenderung berpihak pada *Ikhwanul Muslimin* dimana Arab Saudi dan kawan-kawannya menganggap bahwa *Ikhwanul Muslimin* adalah organisasi teroris (Knell, 2018), hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan *stereotype* dalam dunia internasional bahwa Qatar adalah negara yang mendukung organisasi teroris.

2.3.2 Dampak Di Bidang Ekonomi

Berbicara mengenai dampak dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar dalam bidang ekonomi sebenarnya tidak seburuk seperti yang dibayangkan. Kendati di awal-awal penerapan blokade tersebut, Qatar mengalami indeks penurunan saham hingga pada titik merah. Pada 4 Juni 2017, indeks saham Qatar yang diukur melalui QE (*Quantitative Easing*) ditutup dengan angka 9.923,6. Sedangkan hari berikutnya tepat dimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya melakukan blokade terhadap Qatar, angka tersebut anjlok ke angka 9.151. Tidak hanya itu, saham yang ada di semua sektor ketika itu anjlok seketika, namun yang paling parah adalah saham *real estate* dengan penurunan nilai yang mencapai 9,9 persen pada pukul 16.52

WIB. Selain itu tidak ada sektor yang penurunannya lebih rendah dari 5 persen (Zuhra, 2017). Seiring berjalannya waktu, ekonomi Qatar akhirnya kembali membaik, hal tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ayham Kamel, ketua *Middle East News Agency* bahwa Qatar tidak benar-benar sedang terisolasi dalam dunia internasional saat ini, itulah pentingnya cadangan gas dan juga ekspor gas yang dilakukan oleh Qatar sebagai lumbung uang baginya. Melalui kekayaan serta dana yang dimiliki negara, Qatar hingga saat ini dalam perekonomian yang sehat (Al-Jazeera, 2018). Hal itu dapat dilihat dari persiapan Qatar dalam rangka menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, dimana mereka dengan cepat mengimpor bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dari China dan Malaysia setelah pemberlakuan blokade terhadap dirinya oleh Arab Saudi yang bermula sejak 5 Juni 2017 silam (FT, 2018). Namun jika berbicara dari segi efektifitas kerja sama ekonomi yang dibangun oleh Qatar dilihat dari sebelum krisis diplomatik terjadi, tentunya terdapat perbedaan yang cukup signifikan, mengingat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan tetangga terdekat Qatar yang selalu mengirimkan pasokan makanan ke Qatar karena faktor kedekatan geografis. Lebih dari itu, kerja sama antara Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain juga memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 86 persen dari

total kerja sama dagang dengan negara-negara Arab (Muliana, 2017).

2.3.3 Dampak Di Bidang Akomodasi Dan Transportasi

Adapun dampak dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar di bidang akomodasi dan transportasi dapat dilihat dari penutupan akses untuk menuju Arab Saudi dan ketiga negara Teluk lainnya melalui jalur tanah, udara dan juga laut (عربي, 2019). Kebijakan ini jelas sangat merugikan masyarakat Qatar yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, mereka harus terhalangi dengan adanya pembatasan terhadap jalur-jalur transportasi tersebut.

2.3.4 Dampak Di Bidang Kemanusiaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi dan ketiga negara Teluk lainnya terhadap Qatar telah mencederai HAM di kawasan Timur Tengah. Sejak kebijakan blokade tersebut diterapkan, setiap warga Qatar yang tinggal di negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir harus meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari, sedangkan mereka yang tinggal di negara-negara tersebut telah banyak yang menikah dengan

orang Arab Saudi dan ketiga negara lainnya dan telah memiliki anak, namun mereka tetap dipaksa untuk meninggalkan negara-negara tersebut dan berpisah dengan keluarganya, hal serupa juga berlaku bagi warga negara Arab Saudi dan warga ketiga negara tersebut yang tinggal di Qatar, mereka diminta untuk kembali ke negara mereka dalam jangka waktu 14 hari, dan hasilnya perceraian antara warga Arab Saudi yang menikah dengan warga Qatar pun semakin banyak (حسن نبي, 2017). Sebagai contoh adalah Fathimah, dia merupakan warga Saudi asli yang menikah dengan warga Qatar dan telah memiliki 4 orang anak, ia mengatakan bahwa situasi ini semakin memperkeruh suasana, dan mempersulitnya untuk menjalin hubungan kerabat-kerabatnya di Qatar, karena blokade telah memaksanya untuk menarik diri dari media sosial (الاجه نبي, 2018). Selain itu, penerapan blokade terhadap wilayah perairan, darat dan udara yang menghubungkan antara Qatar dan Arab Saudi juga sangat mengganggu rutinitas masyarakat Qatar, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah, hal itu menjadi sangat sulit untuk dilakukan lantaran adanya hambatan dari jalur udara oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Qatar, selain itu, satu-satunya jalur masuk melalui pos perbatasan yang menghubungkan Qatar dan Arab Saudi melalui jalur darat

juga telah ditutup selama dua tahun (Perdana, 2019). Pembatasan tersebut kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari *Al-Quds Al-Arabi*, komite menuding Arab Saudi telah melanggar rambu-rambu syari'ah serta hukum internasional, komite menjelaskan bahwa pelarangan dan pembatasan tersebut bertentangan dengan rukun Islam yang kelima, yang isinya adalah mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji sekali seumur hidup (Aminuddin, 2018). Tuduhan terkait larangan bagi warga Qatar untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah tidak hanya tertuju pada Arab Saudi, tuduhan serupa juga tertuju pada negara Qatar itu sendiri, yang diduga kuat disebabkan oleh krisis diplomatik yang terjadi di Qatar saat ini, namun pemerintah Qatar sendiri telah membantah tuduhan tersebut melalui QNA (*Qatar News Agency*), otoritas Qatar di kementerian Urusan agama juga menafikkan tuduhan tersebut pada 1 Agustus 2018, ia mengatakan bahwa pemerintah Qatar sama sekali tidak melarang warganya untuk menunaikan ibadah haji, hanya saja mereka hanya menyesalkan oknum-oknum yang menjadikan momen haji sebagai tujuan politik semata (Augesti, 2018).